

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

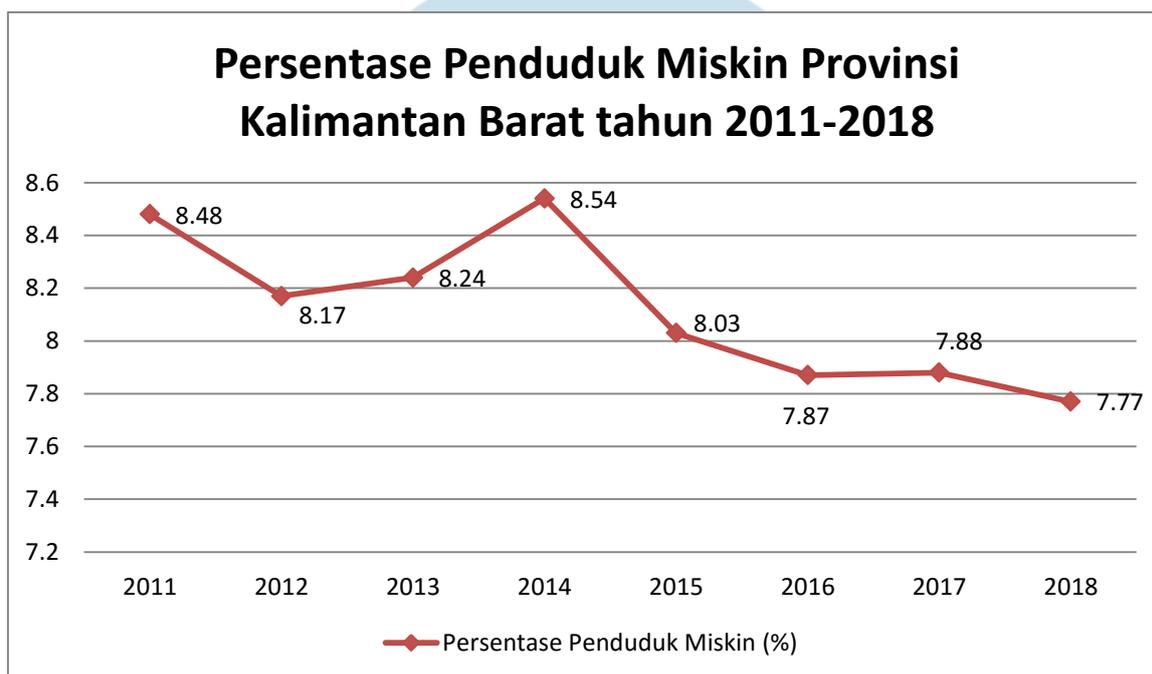
Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai jika perekonomian pada suatu negara mengalami peningkatan dalam proses produksi barang dan jasa secara terus menerus di berbagai sektor atau kegiatan ekonomi masyarakat. Proses pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi antara lain : sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan kemajuan teknologi. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing (Sukmaraga, 2011). Kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dapat disebabkan oleh proses pembangunan ekonomi dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999). Salah satu faktor yang dapat menghambat tercapainya pembangunan suatu negara adalah kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan merupakan suatu bentuk ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari sisi ekonomi. Penduduk yang termasuk dalam kategori miskin apabila mempunyai pengeluaran perkapita perbulannya tidak lebih dari garis kemiskinan (GK). Kemiskinan adalah persoalan kompleks yang berkaitan dengan berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan dapat menghambat kemampuan individu dalam mengembangkan keterampilannya serta menghambat individu untuk tetap hidup sehat dan layak.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang pada dasarnya masih banyak terjadi di negara berkembang, seperti di Indonesia. Menurut Sumarto (2014) Pemerintah Indonesia menyadari untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur salah satu upaya yang harus diperhatikan adalah pembangunan ekonomi. Dalam satu dekade terakhir Indonesia berhasil membuat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Dilihat dari tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan juga perlu diarahkan ke pembangunan di daerah yang masih tertinggal. Setiap daerah perlu dilakukan pembangunan sesuai kebutuhan masing – masing daerah dengan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh sebab itu,

persoalan kemiskinan bukan hanya masalah nasional saja, tetapi juga merambah ke setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Barat.

Merujuk pada data BPS (2016) selama kurun waktu 8 tahun terakhir menunjukkan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan barat masih berfluktuatif yakni di tahun 2013 – 2014 mengalami kenaikan pada awalnya 8,24% menjadi 8,54%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 8,03% dan mengalami penurunan lagi ditahun 2016 menjadi 7,87%.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (2016)

Grafik 1. 1
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2018

Menurut BPS (2016) dalam sensus ekonomi tahun 2016 penyebab kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat masih belum stabil karena keterbelakangan masyarakatnya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi masih kurang, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan dimana masyarakatnya sangat sulit dalam memperoleh akses informasi, pendidikan, dan teknologi serta masih kurangnya fasilitas umum, seperti jalan raya, sekolah dan rumah sakit. Perlu adanya pemerataan bagi setiap daerah di Provinsi Kalimantan Barat agar kesenjangan dan kemiskinan berkurang.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah salah satu dari indikator yang mencerminkan kondisi kinerja

perekonomian di suatu daerah. PDRB juga merupakan gambaran produktifitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dan kemampuan wilayah tersebut dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang ada. Apabila suatu daerah perekonomiannya semakin baik tentu menggambarkan kondisi masalah seperti kemiskinan yang semakin berkurang. Menurut Giovanni (2018) pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan atau tercapainya suatu pembangunan dan menjadi salah satu syarat pengurangan tingkat kemiskinan.

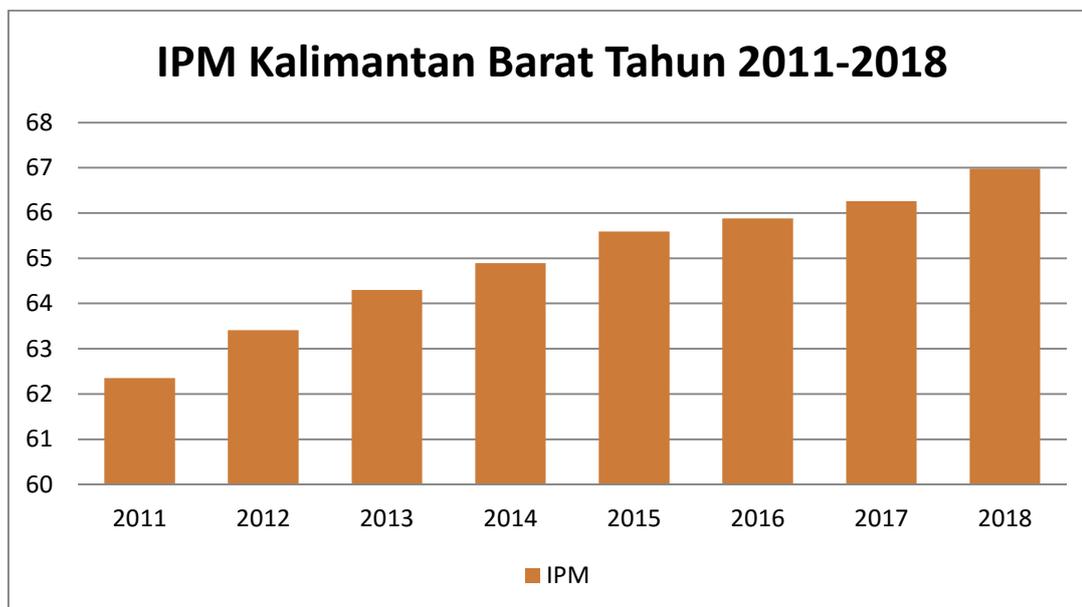


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan (2022)

Grafik 1. 2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2018

Berdasarkan Grafik 1.2 PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2018 terus mengalami kenaikan, tetapi hal ini tidak disertai dengan kenaikan kinerja pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS (2015) kinerja pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat masih belum stabil dan pemerataan pembangunan masih belum merata terutama di daerah pedalaman dan perbatasan sangat masih kurang jika dibandingkan dengan perkotaan, hal ini masih menjadi tantangan dari pemerintah daerah. Pembangunan suatu wilayah yaitu bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pembangunan suatu wilayah juga bertujuan untuk memajukan kehidupan masyarakatnya. Kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya bisa dilihat dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut BPS (2020) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM adalah indikator penting bagi suatu negara untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas SDM sehingga bisa menjelaskan tingkat pembangunan suatu wilayah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (2015)

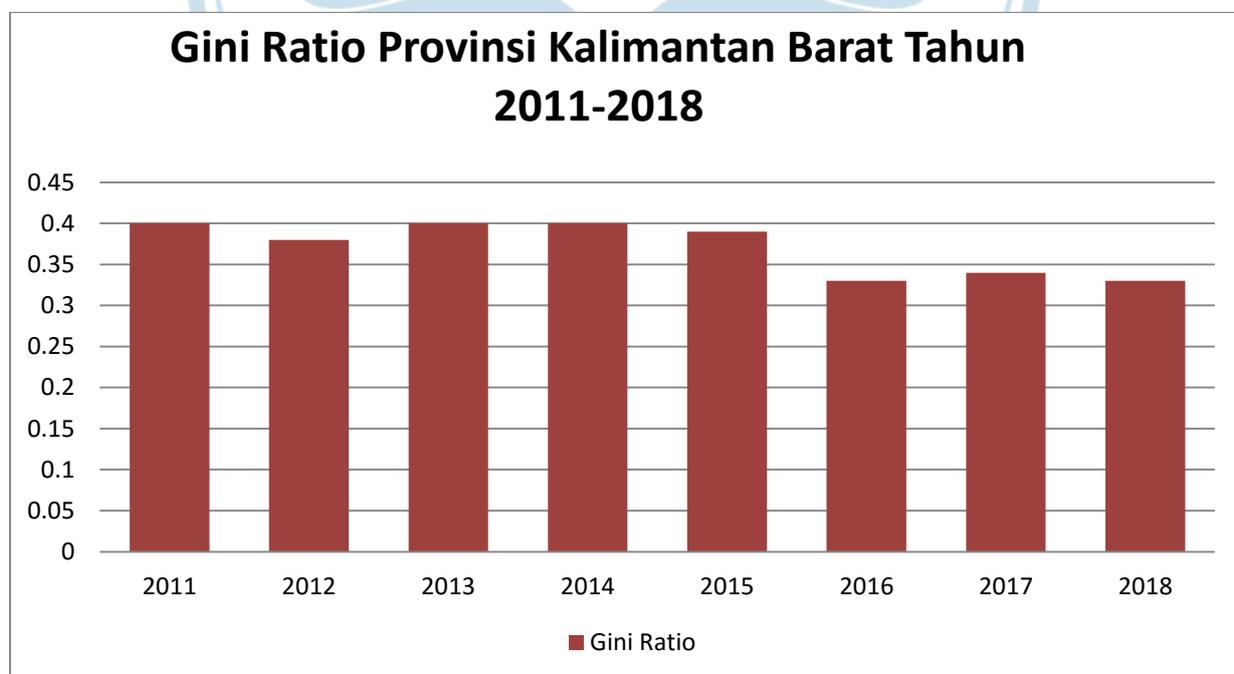
Grafik 1.3
IPM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2018

Menurut data di atas secara keseluruhan IPM di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami kenaikan. Tetapi secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah disekitar Kalimantan Barat belum bisa dikatakan berhasil, mengingat fasilitas umum seperti jalan, sekolah, pelayanan kesehatan masih sangat kurang terutama di daerah perbatasan dan pedalaman sehingga masyarakat sulit untuk berkembang dan maju. Menurut Sutarno dan Kuncoro (2003) menjelaskan bahwa perbedaan pembangunan akan mengakibatkan perbedaan kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin besar. Tingginya ketimpangan tidak hanya menimbulkan ketegangan sosial tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan merupakan ketidakmerataan pembangunan suatu daerah yang diakibatkan adanya perbedaan sumber daya alam, sarana dan prasarana untuk mendukung perekonomian suatu wilayah. Angka ketimpangan pendapatan yang tinggi berdampak pada pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat (Todaro dan Smith, 2011).

Ketimpangan Pendapatan adalah suatu permasalahan mendasar yang selalu di hadapi dalam perekonomian negara yang selalu ditekan agar semakin berkurang. Terkosentrasinya kegiatan perekonomian pada suatu daerah tertentu akan berdampak secara langsung pada pada ketimpangan pendapatan antar daerah sehingga menyebabkan terjadinya kondisi dimana suatu daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi akan lebih mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi sehingga masyarakatnya relatif lebih makmur sedangkan didaerah yang bukan pusat kegiatan ekonomi hanya mampu memberikan pendapatan yang rendah sehingga berakibat relatif rendah pula kemakmuran masyarakatnya (Tambunan, 2001).

Menurut BPS (2019) perubahan tingkat ketimpangan dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Pendapatan suatu daerah yang tinggi menunjukkan bahwa meningkatnya konsumsi suatu daerah yang merupakan bentuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Salah satu untuk melihat ketimpangan pendapatan adalah dengan melihat nilai dari *gini ratio*. *Gini ratio* merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang memiliki nilai 0 – 1. BPS menjelaskan semakin tinggi nilai *gini ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika nilai *gini ratio* semakin rendah mendekati 0 maka ketimpangan semakin merata.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (2016)

Grafik 1. 4
***Gini Ratio* Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2018**

Berdasarkan nilai *gini ratio* di Kalimantan Barat Tahun 2011-2018 masih berfluktuatif. *Gini ratio* tertinggi pada tahun 2011, 2013, dan 2014 sebesar 0,40% dan untuk terendah ada ditahun 2016 sebesar 0,33%. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2018 masih belum stabil dan masih dalam kondisi yang tidak merata. Mengingat adanya ketimpangan di daerah pedalaman dan perbatasan dimana masyarakatnya sangat sulit dalam memperoleh akses informasi, pendidikan, dan teknologi serta masih kurangnya fasilitas umum, seperti jalan raya, sekolah dan rumah sakit jika dibandingkan dengan masyarakat daerah perkotaan. Sehingga akan berdampak terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2018?
- 2) Bagaimanakah pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2018?
- 3) Bagaimanakah pengaruh *gini ratio* terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2018.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2018.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *gini ratio* terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

- 1) Pemerintah, sebagai salah satu pertimbangan atau referensi ide dalam menentukan kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam menurunkan aspek kemiskinan.
- 2) Peneliti dan pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding untuk penelitian lain yang terkait ataupun penelitian yang lebih lanjut.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan teori, fakta dan penelitian – penelitian yang telah dilakukan, maka penulis berasumsi bahwa :

- 1) Diduga PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2018.
- 2) Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2018.
- 3) Diduga *gini ratio* berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 – 2018.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hipotesis, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bagian ini memaparkan penelitian – penelitian terdahulu, studi – studi empiris yang terkait dengan penelitian ini untuk dijadikan landasan, serta teori teori yang menjelaskan setiap variabel penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bagian ini memaparkan rincian penelitian berupa lokasi, sumber dan jenis data yang digunakan, alat analisis, dan alur pengujian.

Bab IV : Hasil Pembahasan

Bagian ini memaparkan proses pengujian beserta pembahasan tentang bagaimana PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan *Gini Ratio* dapat mempengaruhi Kemiskinan.

Bab V : Penutup

Bagian ini memaparkan kesimpulan dari rangkaian penelitian yang telah dijalankan beserta saran dari penulis terkait permasalahan dalam penelitian

